

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (1997). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- APBN. (2020). APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020. *APBN Kita*, 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Atpetsi. (2020). *Apa itu Pajak Penghasilan Final?* <https://atpetsi.or.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final#:~:text=Sederhananya%2C PPh final adalah pajak,atau diperoleh selama tahun berjalan.>
- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?* Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>
- DDTCNews, R. (2021, August 10). *UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP: Yuk, Manfaatkan*. Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912?page_y=47
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Teori, Konsep, dan Isu*. Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2020*.
- Gunadi. (2002). *Indonesian Taxation: A Reference Guide*. Multi Utama Publishing.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif pajak Penghasilan* (1st ed.). Bee Media Indonesia.
- Islamy, M. I. (1998). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Judisseno, R. K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Melalui UU HPP Pemerintah akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp->

pemerintah-akan-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/

Kementerian Keuangan. (2021b). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/>

Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, 2018–2019. <https://www.depkop.go.id>

Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

Kurniati, D. (2020). *Pemanfaatan PPh Final DTP Baru 19%, Ini Realisasi Stimulus untuk UMKM*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-pph-final-dtp-baru-19-ini-realisisi-stimulus-untuk-umkm-24912?page_y=0

Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Maharatih, N. W. (2019). Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.

Masitoh, S. (2021). *Melebihi Target, Realisasi Penerimaan Pajak di 2021 Capai Rp 1.277,5 Triliun*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisisi-penerimaan-pajak-di-2021-capai-rp-12775-triliun>

Mutia A., C. (2021). *Pemasaran Jadi Kendala Terbesar Bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi* | Databoks. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/pemasaran-jadi-kendala-terbesar-bagi-pelaku-usaha-di-masa-pandemi>

Nabila, F. (2019). *Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia*. Smartlegal.Id. <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>

Nurmantu, S. (2007). Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Adminstrasi Dan Organisasi,Bisnis & Birokrasi*.

- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK-210/PMK.01/2017, (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2021).
- Pradipta, T. (2021). *Tinjauan Pemanfaatan Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Masa Pandemi Covid-19 oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cibeunying*.
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Penerbit Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Salemba Empat.
- Ritonga, A. A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia* (S. Argo Hananto (ed.)). Pustaka El Manar.
- Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 10, 20.
- Sebayang, R. (2020). *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (1983).

Zamzami, M. (2021). *Tinjauan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan di KPP Pratama Kotabumi*.

Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.